



**KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA
KONTRAK DALAM PELAKSANAAN HUBUNGAN KERJA
PADA KANTOR GUBERNUR PEMERINTAH PROVINSI PAPUA**

*Legal Protection Juridical Study for Contract Workers in
Implementing Employment Relations at the Governor of the Governor
of the Papua Provincial Government*

TESIS

*Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum*

Oleh:

**DANIEL LAURENCE HEUMASSY
NIM: 2022025015015**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
JAYAPURA
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

TESIS

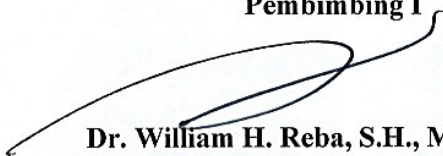
**KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KONTRAK
DALAM PELAKSANAAN HUBUNGAN KERJA PADA KANTOR
GUBERNUR PEMERINTAH PROVINSI PAPUA**

*Legal Protection Juridical Study for Contract Workers in Implementing
Employment Relations at the Governor of the Governor
of the Papua Provincial Government*

Telah diperiksa dan disetujui
Pada Tanggal, 24 Juni 2024

Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. William H. Reba, S.H., M.Hum
NIP. 19620909 199103 1 001

Pembimbing II


Dr. Sobardo Hamonangan, S.H., M.Hum
NIP. 19671108 199403 1 004

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum**




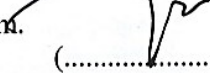

Dr. Marthinus Mambaya, S.H., M.Hum
NIP.19660302 199303 1 002


PELAKSANAAN UJIAN

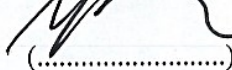
Tesis ini telah diuji Pada Tanggal, 26 Juni 2024


TIM PENGUJI

Ketua/Anggota : Dr. William H. Reba, S.H., M.Hum.
NIP. 19620909 199103 1 001  (.....)

Sekretaris/Anggota : Dr. Sobardo Hamonangan, S.H., M.Hum.
NIP. 19671108 199403 1 004  (.....)

Anggota : Dr. Marthinus Mambaya, S.H., M.Hum.
NIP. 19660302 199303 1 002  (.....)

Anggota : Dr. Yantje Liauw, S.H., M.Hum.
NIP. 19600705 199303 1 004  (.....)

Anggota : Dr. Y. D. W. Susi Irianti, S.H., M.Hum.
NIP. 19660720 199303 2 003  (.....)

**PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DANIEL LAURENCE HEUMASSY

NIM : 2022025015015

Judul : Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kontrak Dalam Pelaksanaan Hubungan Kerja Pada Kantor Gubernur Pemerintah Provinsi Papua.

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister, baik di Universitas Cenderawasih maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lain sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Jayapura, 26 Juni 2024

Yang Membuat Pernyataan,

**DANIEL LAURENCE HEUMASSY
NIM : 2022025015015**

ABSTRAK

DANIEL LAURENCE HEUMASSY, 2024. *Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kontrak Dalam Pelaksanaan Hubungan Kerja Pada Kantor Gubernur Pemerintah Provinsi Papua* (dibimbing oleh Dr. William H. Reba, S.H., M.Hum., sebagai Pembimbing I dan Dr. Sobardo Hamonangan, S.H., M.Hum., sebagai Pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Status dan Kedudukan Tenaga Kontrak dalam pelaksanaan hubungan kerja pada Kantor Gubernur Pemerintah Provinsi Papua, dan Perlindungan Hukum terhadap Hak Normatif Tenaga Kontrak pada Kantor Gubernur Pemerintah Provinsi Papua.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang berkaitan dengan telaah dari aspek aturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti, sedangkan Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk melihat sejauhmana peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hubungan Kerja kaitannya dengan perlindungan hak-hak tenaga kontrak terimplementasi dalam prakteknya ketenagakerjaan pada masyarakat.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Status dan kedudukan hukum tenaga kontrak dalam hubungan kerja pada Kantor Gubernur Provinsi Papua adalah sebagai tenaga kerja dengan status sebagai pekerja tidak tetap berdasarkan Kontrak Kerja yang dilakukan berdasarkan waktu tertentu. Sedangkan kedudukan tenaga kontrak adalah sebagai tenaga kerja atau pekerja swasta yang tidak sama atau bukan sebagai pegawai ASN, sehingga dalam pemenuhan hak dan kewajiban tenaga kontrak pada dasarnya tunduk pada ketentuan hukum ketenagakerjaan sebagaimana yang berlaku pada hubungan kerja tenaga kerja swasta pada umumnya yang bekerja pada suatu perusahaan. Sementara Perlindungan Hukum bagi tenaga kontrak dalam pelaksanaan hubungan kerja pada Kantor Gubernur Pemerintah Provinsi Papua belum bahkan tidak terlindungi secara maksimal, hal ini didasarkan data dan fakta dilapangan yang menunjukkan bahwa tenaga kontrak tidak mendapatkan pembayaran upah yang sesuai dengan ketentuan Upah Minimum Provinsi yang berlaku, dimana upah yang diterima oleh tenaga kontrak adalah Rp 3.200.000, perbulan sementara besaran upah yang berlaku adalah Rp.4.020.270,- perbulan sesuai dengan SK Gubernur Papua Nomor 188.4/398/2023 yang berlaku sejak 1 Januari 2024. Demikian juga halnya dengan hak tenaga kontrak atas jaminan sosial tidak terlindungi mengingat tenaga kontrak tidak diikutsertakan sebagai peserta jaminan sosial pada BPJS Ketenagakerjaan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tenaga Kontrak, Hubungan Kerja, dan Kantor Gubernur Pemerintah Provinsi Papua

ABSTRACT

DANIEL LAURENCE HEUMASSY, 2024. “ *Legal Protection Juridical Studies for Contract Workers in the Implementation of Employment Relations at the Papua Provincial Government's Governor's Office Juridical Legal Protection for Contracts in the Implementation of Employment Relations at the Governor of the Papua Provincial Government (Guided by Dr. William H. Reba, S.H., M.Hum. , As Supervisor I and Dr. Sobardo Hamonangan, S.H., M.Hum., As Supervisor II).*)

This research aims to determine and analyze the status and position of contract workers in the implementation of employment relations at the Governor's Office of the Papua Provincial Government, and legal protection for the normative rights of contract workers at the Governor's Office of the Papua Provincial Government.

The approach method used in this research is a normative juridical and empirical juridical approach. The normative juridical approach is research related to the study of aspects of statutory regulations related to the problem being studied, meanwhile, an empirical juridical approach is used to see the extent to which laws and regulations relating to employment relations in relation to protecting the rights of contract workers are implemented in employment practice in society.

The results showed that the status and position of the contract of contract personnel in the employment relationship at the Papua Province Governor's Office was as a workforce with the status as a non -permanent worker based on a employment contract based on a certain time. meanwhile, the position of contract workers is as workers or private workers who are not the same or not as ASN employees, so that the fulfillment of the rights and obligations of contract workers is basically subject to the provisions of labor law as applicable to the employment relationship of private workers in general who work in a company. Meanwhile, legal protection for contract workers in carrying out work relations at the Governor's Office of the Papua Provincial Government is not even maximally protected, this is based on data and facts in the field which show that contract workers do not receive wage payments in accordance with the applicable Provincial Minimum Wage provisions, where the wage received by contract workers is IDR 3,200,000, per month while the applicable wage amount is IDR 4,020,270,- per month in accordance with the Decree of the Governor of Papua Number 188.4/398/2023 which has been in effect since January 1 2024. Likewise with Contract workers' rights to social security are not protected considering that contract workers are not included as social security participants in BPJS Employment.

Key words: *Legal Protection, Contract Labor, Employment Relations, and the Governor's Office of the Papua Provincial Government.*

MOTTO DAN PESEMBAHAN

MOTTO : “ *Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan* “
(Amsal 1 ayat 7)

KUPERSEMBAHKAN KEPADA :

Dengan penuh kerendahan hati kupersembahkan karya tulis ini kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa mencurahkan Kasih dan BerkatNya kepada penulis sepanjang perjalanan kehidupan ini.
2. Kedua orangtuaku terkasih, Ayah (Alm.) Drs. Otniel Marthen Heumassy dan Ibu Dra. Juliana Adelheid Upessy yang telah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang serta doa-doanya yang tak kunjung berkesudahan.
3. Rosina Upessy, S.H., yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang dan bantuan yang tak kunjung berkesudahan.
4. Isteri tercinta, Betryks Novalya Silooy, S.Hut., yang senantiasa memberikan dukungan dan motifasi bagi penulis dalam melanjutkan studi pada jenjang Strata Dua (S2) pada Program Magister Ilmu Hukum.
5. Anakku tersayang, Loedewijk Jordan Rufus Heumassy yang menjadi sumber semangat dan kebanggaaku.
6. Saudaraku terkasih, (Alm.) Alexander Heumassy, beserta seluruh keluarga besarku Heumassy.
7. Semua teman-teman pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Tahun Angkatan 2022/2023;
8. Almamater kebanggaanku Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus atas segala kasih dan berkat-Nya yang senantiasa menyertai penulis dalam menyelesaikan Tesis dengan judul :” *Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kontrak Dalam Pelaksanaan Hubungan Kerja Pada Kantor Gubernur Pemerintah Provinsi Papua*” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura.

Penulis sadar sungguh bahwa Tesis ini masih sangat jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu tidak dapat dipungkiri bahwa dalam menyusun dan menyelesaikan Tesis ini banyak mendapat saran dan kritik serta bantuan dari berbagai pihak.

Dan pada kesempatan ini juga penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr. Oscar Oswald Wambrauw, S.E., M.Sc., Agr., selaku Rektor Universitas Cenderawasih.
2. Bapak Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
3. Bapak Dr. Marthinus Mambaya, S.H., M. Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
4. Bapak Dr. William H. Reba, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I yang telah memberikan sumbangsih pemikiran berupa arahan dan bimbingan sehingga penulisan Tesis ini sukses terlaksana sebagaimana mestinya.
5. Bapak Dr. Sobardo Hamonangan, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan yang berguna dalam penyelesaian Tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Tim Penguji, Bapak Dr. William H. Reba, S.H., M.Hum, Bapak Dr. Sobardo Hamonangan, S.H., M.Hum, Bapak Dr. Marthinus Mambaya, S.H., M.Hum, Bapak Dr. Yantje Liauw, S.H., M.Hum dan Ibu Dr. Y.D.W. Susi Irianti, S.H., M.Hum.
7. Bapak dan Ibu Dosen pengajar pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura, yang telah dengan ikhlas memberikan ilmu kepada penulis selama masa studi.

8. Seluruh Tenaga Administrasi Civitas Akademika Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura, yang telah memberi bantuan dalam proses administrasi dan registrasi selama masa studi sampai penyelesaian studi ini.
9. Para Pimpinan SKPD di lingkungan Kantor Gubernur Provinsi Papua, atas semua bantuan dan sumbangsuhnya yang telah ikut membantu dalam pengumpulan data terutama untuk penyusunan Tesis ini.
10. Para Tenaga Kontrak yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas segala bantuannya dalam memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Tesis ini sehingga dapat terselesaikan.

Akhir kata semoga karya ilmiah yang tidak sempurna ini tetap dapat memberi manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan kalangan mahasiswa program studi ilmu hukum khususnya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan kasih dan berkat-Nya untuk kita semua. Amin.

Jayapura, 21 Juni 2024
Penulis,

DANIEL LAURENCE HEUMASSY

DAFTAR ISI

Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Pelaksanaan Ujian	iii
Pernyataan Tidak Plagiat	iv
Abstrak	v
Abstact	vi
Motto dan Persembahan	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Istilah Tenaga Kontrak	14
B. Hubungan Kerja	18
C. Perjanjian Kerja	22
D. Perjanjian Kerja Bersama	32
E. Pengupahan	34
F. Jaminan Sosial (BPJS Ketenagakerjaan)	46
G. Teori Perlindungan Hukum	55

H. Teori Keadilan	58
I. Kerangka Pikir	61
J. Bagan Kerangka Pikir	64
BAB III METODE PENELITIAN	65
A. Jenis Penelitian	65
B. Metode Pendekatan	65
C. Lokasi Penelitian	66
D. Populasi dan Sampel	66
E. Jenis dan Sumber Data	68
F. Teknik dan Pengumpulan Data	69
G. Analisis Data	70
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	71
A. Status dan Kedudukan Tenaga Kontrak Dalam Pelaksanaan Hubungan Kerja pada Kantor Gubernur Pemerintah Provinsi Papua	71
B. Pelaksanaan Pemenuhan Terhadap Hak-hak Tenaga Kontrak Dalam Pelaksanaan Hubungan Kerja pada Kantor Gubernur Pemerintah Provinsi Papua	83
BAB V PENUTUP	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	110